

**PERANAN CAMAT DALAM MELAKSANAKAN
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PANYABUNGAN
SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

OLEH

A S P A N

NPM : 03 850 0068

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

M E D A N

2 0 0 7

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Judul Skripsi : PERANAN CAMAT DALAM MELAKSANAKAN
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PANYABUNGAN
SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nama Mahasiswa : ASPAN

NPM : 03 850 0068

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

**Menyetujui
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H.M. Yusuf Harahap

Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Mengetahui

Ketua Jurusan

Dekan

Drs. H.M. Yusuf Harahap

Drs. H.M.H. Thamrin Nasution, MSi.

Tanggal Lulus :

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“Peranan Camat Dalam Melaksanakan Pembangunan Di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal”**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Drs. H.M.H Thamrin Nasution, MSi, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area .
- Bapak dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan membesarkan penulis, serta tak lupa do'a restu yang tulus selama penulis

menuntut ilmu.

- Bapak Drs. H.. Yusuf Harahap, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II penulis.
- Bapak Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal beserta staf dimana penulis mengadakan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2007

Penulis

ASPAN
NIM : 03 850 0068

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Hipotesis	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Pemerintahan Kecamatan	12
B. Pengertian Pembangunan	13
C. Pengertian Pemerintahan	17
D. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	18
E. Fungsi Camat Sebagai Kepala Wilayah	22
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Populasi dan Sampel	26
B. Metode Pengumpulan Data	26
C. Variabel dan Definisi Operasional	27
D. Metode Analisis Data	29

BAB IV.	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	31
A.	Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal	31
B.	Demografi Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal	32
C.	Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal dan Uraian Tugas.....	34
BAB V.	ANALISIS DATA.....	43
A.	Analisis Struktur Organisasi	43
B.	Camat Sebagai Administrator Pemerintahan dan Pembangunan.....	45
C.	Kedudukan dan Wewenang Camat Selaku Kepala Pemerintahan di Wilayahnya.....	50
D.	Analisis Terhadap Penyelenggaraan Koordinasi Di Wilayah Kecamatan.....	53
E.	Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.....	54
BAB VI.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dewasa ini adalah untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dilakukan usaha peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang yang menyentuh aspek kehidupan rakyat.

Kewajiban melaksanakan pembangunan nasional dimaksud untuk mencapai Tujuan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut : Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dn keadilan sosial.

Selanjutnya, pembangunan nasional tersebut memerlukan suatu pola untuk menjamin terselenggaranya cita-cita rakyat.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku pemegang kedaulatan rakyat tertinggi, salah satu

tugasnya menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pada hakekatnya adalah suatu Pola Umum Pembangunan Nasional yang merupakan rangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah, terpadu dan berlangsung terus menerus.

Pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat di atas dilakukan secara merata ke seluruh tanah air dengan maksud agar hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Pembangunan yang dilaksanakan tidak saja dilakukan di tingkat wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kotamadya saja, tetapi juga di tingkat wilayah Kecamatan-kecamatan dan bahkan di tingkat desa.

Aspirasi yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini antara lain menjelaskan bahwa azas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan azas dekonsentrasi, serta memberi kemungkinan pula bagi pelaksanaan azas tugas pembantuan. Dengan azas desentralisasi dibentuklah daerah otonom yang dipusatkan pada tingkat Kabupaten/Kota, yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan melalui azas dekonsentrasi diadakan wilayah Administratif yang terdiri dari Propinsi.

Kecamatan sebagai lingkungan kerja perangkat pemerintah wilayah kabupaten/kota membawahi beberapa Desa/Kelurahan, dipimpin oleh seorang Camat.

DAFTAR PUSTAKA

- E. Eriksen dan T. Nomsamchue. *Memahami Statistik Untuk Ilmu Sosial*. LP3ES. Jakarta 1998.
- Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja A.R., *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta, Gunung Agung, 1996.
- H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 1997.
- S. Prajudi Atmosudirdjo, *Administrasi dan Management Umum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Soewarno Handyaningrat, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1997.
- _____, *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*, Jakarta, Gunung Agung, 1993.
- Taliziduhu Ndraha. *Methodologi Pemerintahan Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta. 2006.
- Talizuddin Ndraha , *Pengertian Desa dan Pembangunan Desa*, Yayasan Karya Darma II, Jakarta, 1997.
- The Liang Gie, *Ensiklopedi Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung, 1991.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, *Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan daerah*, Politeia, Bogor, 2005.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka, 1996.